

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN
KAPUAS HULU



DESEMBER 2024

RENCANA KERJA TAHUNAN 2025

PERIODE 2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu. Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2021 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Putussibau, Desember 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU



S. S.SOS., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19671201 198908 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengantujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan PD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) PD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan PD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (PD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026.

Dinas perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan organisasi perangkat daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan

pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan ;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan di bidang Perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas ;dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Dinas Perhubungan tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu–isu strategis sebagai berikut :

1. Kondisi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di bidang Perhubungan yang kurang laik,
2. Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang masih kurang,
3. Masih kurangnya SDM di bidang Perhubungan,
4. Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan angka menengah daerah serta tata cara perubahan serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah,
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031. (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 adalah :

1. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan satu tahun Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025
 2. Menyediakan arah penyusunan penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025
 3. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT,PD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT PD

1.3 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT PD serta susunan garis besar dokumen

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2018

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Tahun 2025

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD yang akan dilaksanakan. Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA PD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian Visi dan Misi PD; dan

2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran Strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, memuat capaian beberapa point diantaranya :

1. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
Capaian kinerja 100% sasaran 1 terdiri dari 1 indikator sasaran yang memenuhi target kinerja.
2. Sasaran : meningkatnya kualitas Sarana dan prasarana Perhubungan
Capaian kinerja 100 % sasaran 2 terdiri dari 3 indikator sasaran yang telah memenuhi target kinerja semua.

Adapun rincian capaian indikator sasaran tahun 2021 dituangkan dalam tabel berikut :

No	Sasaran	indikator	target	realisasi	keterangan
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi SAKIP	B	BB	tercapai
2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	75	tercapai
		% Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	79	75	tercapai
		% Angkutan Umum LAIK jalan	85	80	tercapai

Data tersebut menunjukkan hasil kinerja Dinas Perhubungan tahun 2021 baik dari kinerja atau dari sumber daya manusia.

Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

1. Sasaran startejik

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, telah menetapkan visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil”

Berikut merupakan penjabaran dari visi diatas tersebut :

1. Harmonis: mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.

2. **Energik:** mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
3. **Berdaya saing:** mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.
4. **Amanah:** mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. **Terampil:** mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Untuk mengwujudkan visi, di perlukan langkah-langkah yang dijabarkan di dalam misi yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, yaitu :

RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi SAKIP	BB
2.	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Angka kecelakaan Lalu lintas	< 10
3.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85
		% Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	75
		% Angkutan Umum LAIK jalan	90

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang dan untuk mengantisipasi pengembangan jalan tol bebas hambatan.

Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarkhi fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan ke-unggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tataruang.

2. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Perhubungan

Program prioritas pembangunan perhubungan darat, yaitu program pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, dan fasilitas konversi BBM serta program gasifikasi angkutan umum perkotaan

3. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Dinas perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 merujuk pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Adapun tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatkan Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten

Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
3. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan
4. Meningkatnya Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Bidang Perhubungan

B. Program dan Kegiatan

Program Dinas Perhubungan merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 dalam upaya pencapaian Sasaran dan Tujuan yang ditetapkan. Program pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 sebanyak 3 Program,Adapun Program-program tersebut sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran program “terselenggaranya penunjang urusan Pemerintah Daerah”

2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Sasaran program “ terselenggaranya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

3) Program Pengelolaan Pelayaran

Sasaran program “terselenggaranya pengelolaan Pelayaran”

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan berdasarkan 3 (tiga) Program di atas, maka rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dari Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program *“Predikat SAKIP Dishub dari Inkab, Tingkat penilaian realisasi keuangan, Tingkat penilaian realisasi keuangan, Indeks Kepuasan Pelayanan Internal, Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah, Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah, dan Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik* adapun kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut ini:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (Output) “Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Sub kegiatan (Output) “dokumen Renstra, Renja, IKU, IKI dan KAK”

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Sub kegiatan (Output) “dokumen RKA ”

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator Sub kegiatan (Output) “dokumen Perubahan RKA-SKPD ”

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Sub kegiatan (Output) “dokumen DPA ”

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Indikator Sub kegiatan (Output) “jumlah dokumen Perubahan DPA ”

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Sub kegiatan (Output) “Dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ dan SAKIP ”

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (Output) "laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan"

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Sub kegiatan (Output) "Daftar Gaji dan tunjangan ASN"

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Sub kegiatan (Output) "Laporan Pengujian/ verifikasi keuangan"

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Indikator Sub kegiatan (Output) "Laporan Keuangan Akhir Tahun"

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (Output) "dokumen administrasi barang milik daerah dan Laporan Kegiatan"

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD

Indikator Sub kegiatan (Output) "Laporan sk tim penghapusan BMD, daftar penghapusan BMD, laporan penghapusan BMD"

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (Output) "Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah"

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan

Indikator Sub kegiatan (Output) "Daftar Kebutuhan pakain dinas beserta atribut kelengkapan"

b. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian

Indikator Sub kegiatan (Output) "Daftar kebutuhan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian"

c. Monitoring ,Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai

Indikator Sub kegiatan (Output) “daftar kebutuhan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai”

- d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Sub kegiatan (Output) “daftar kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi”

- d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Sub kegiatan (Output) “Daftar Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undang”

- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (Output) “Dokumen administrasi umum dan Laporan Kegiatan”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Indikator Sub kegiatan (Output) “Daftar Kebutuhan komponen listrik/ penerangan dan Laporan Penggunaan komponen Listrik”

- b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Indikator Sub kegiatan (Output) “Daftar kebutuhan barang cetakan / penggandaan dan Laporan penyediaan barang cetakan”

- c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Indikator Sub kegiatan (Output) “daftar kebutuhan buku-buku/ bahan bacaan dan Laporan penyediaan buku-buku/ bahan bacaan”

- d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Indikator Sub kegiatan (Output) “Daftar Rapat SKPD dan Daftar Perjalanan Dinas”

- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan (Output) “Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator Sub kegiatan (Output) “Daftar penggunaan jasa surat menyurat”

- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Indikator Sub kegiatan (Output) “Daftar penggunaan telepon dan internet, daftar penggunaan Air ledeng dan daftar penggunaan daya listrik”

- c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Indikator Sub kegiatan (Output) “Daftar pegawai Non ASN dan Laporan Sasaran Kinerja Pegawai non ASN”

- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan (Output) “Dokumen Pemeliharaan dan Laporan Kegiatan”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Indikator Sub kegiatan (Output) “Daftar kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dan Laporan pemeliharaan kendaraan dinas”

- b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Indikator Sub kegiatan (Output) “Daftar kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan laporan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya”

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program *“Porsentase tersedianya Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)”* adapun kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut ini:

- 1) Kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan (Output) “terlaksananya kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota

Indikator Sub kegiatan (Output) “jumlah fasilitas prasarana jalan(rambu-rambu lalu lintas) yang disedia”

- b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota

Indikator Sub kegiatan (Output) “jumlah fasilitas perlengkapan Jalan di jalan (PJU) yang terpasang”

- c. Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan

Indikator Sub kegiatan (Output)” jumlah fasilitas perlengkapan Jalan di jalan (PJU yang terpelihara”

- 2) Kegiatan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Indikator kegiatan (Output) “terlaksananya kegiatan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

Indikator Sub kegiatan (Output) “jumlah Gedung terminal yang direhabilitasi dan terpelihara”

3) Kegiatan Penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir

Indikator kegiatan (Output) “terlaksananya kegiatan Penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Sub kegiatan (Output) “jumlah kegiatan pengawasan dan penertiban perparkiran”

4) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator kegiatan (Output) “terlaksananya kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

b. Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor

Indikator Sub Kegiatan (Output) “jumlah kendaraan bermotor wajib uji”

5) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan (Output) “terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan Zona Selamat Sekolah

Indikator Sub Kegiatan (Output) “jumlah Pembangunan Zona Selamat Sekolah”

C. Program Pengelolaan Pelayaran

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program “*persentase tersedian Fasilitas ASDP*” adapun kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut ini:

1) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha

Indikator kegiatan (Output) “terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan (Output) “jumlah lokasi kegiatan koordinasi dan dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan ASDP”

- 2) Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan (Output) “terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan (Output) “jumlah lokasi kegiatan koordinasi dan dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek di Kabupaten Kapuas Hulu”

- 3) Pembangunan dan Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau

Indikator sub kegiatan (Output) “jumlah tambatan Perahu yang dibangun”

- b. Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau

Indikator sub kegiatan (Output) “jumlah Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau”

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KAPUAS HULU

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	4 Dokumen	1.408.000	PAJAK DAERAH		4 Dokumen	2.600.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	4 Dokumen	1.518.000	PAJAK DAERAH		4 Dokumen	3.000.000

		Dokumen RKA-SKPD							
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	4 Dokumen	2.393.000	DAU		4 Dokumen	3.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	3 Dokumen	3.102.000	RETRIBUSI DAERAH-LRA		3 Dokumen	5.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	4 Laporan	1.528.000	RETRIBUSI DAERAH-LRA		4 Laporan	3.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat									

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	1 Laporan	49.979.000	RETRIBUSI DAERAH-LRA		1 Laporan	50.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	13 Paket	53.280.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		13 Paket	60.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	1 Dokumen	4.088.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	6.000.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	-	4.824.000	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	5.824.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	-	674.080.000	DAU			1.000.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	8 Orang	154.532.033	DANA BAGI HASIL (DBH)		8 Orang	200.000.000
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	-	5.004.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		-	8.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	1 Paket	36.020.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Paket	45.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	-	17.955.000	DAU		-	35.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	-	9.600.000	DAU		-	13.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	1 Laporan	9.992.000	RETRIBUSI DAERAH-LRA		1 Laporan	15.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	1 Laporan	294.303.000	DAU		1 Laporan	500.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	-	5.000.000	PENDAPATAN BAGI HASIL		-	8.000.000

	Dukungan Pelaksana Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksana Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dokumen	29.361.000	DANA BAGI HASI (DBH)		1 Dokumen	30.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	-	5.000.000	DAU		-	6.000.000
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	4 Laporan	116.000.000	PENDAPATAN BAGI HASIL		4 Laporan	13.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	1 Laporan	99.373.000	DANA BAGI HASI (DBH)		1 Laporan	110.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	5 Unit	210.102.267	DANA BAGI HASI (DBH)		5 Unit	350.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	-	21.150.000	PAJAK DAERAH		-	-
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Kapuas Hulu	1 Unit	30.000.000	PAJAK DAERAH		1 Unit	55.000.000

PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ									
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kapas Hulu	1 Dokumen	-	DAU	-	-	-	100.000.000

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kabupaten Kapuas Hulu,	-	-	DAU		-	220.000.000
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kabupaten Kapuas Hulu,	60 Unit	900.000.000	DAU		60 Unit	1.500.000.000

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	150 Unit	390.000.000	-	-	150 Unit	800.000.000
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				4.953.600				20.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kabupaten Kapuas Hulu,	1 Unit	4.953.600	PAJAK DAERAH		1 Unit	20.000.000

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan	Kabupaten Kapuas Hulu,	4 Laporan	73.050.000	PAJAK DAERAH		4 Laporan	100.000.000

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	4 Orang	-	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	1 Dokumen	39.075.000	DAU	-	1 Dokumen	45.000.000

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								
Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	-	-	DAU	-	-	-
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan jalan Kabupaten/Kota	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	1 Laporan	5.051..100	PAJAK DAERAH	-	-	15.000.000
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	1 Dokumen	-	DAU	-	-	500.000.000

Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	1 Laporan	110.000.000	DAU		1 Laporan	150.000.000
---	--	-------------------------------------	-----------	-------------	-----	--	-----------	-------------

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota								
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	1 Laporan	-			1 Laporan	50.000.000
Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	0 Orang	-	DAU	-	0 Orang	15.000.000
Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Dishub Kabupaten Kapuas Hulu	0 Dokumen	-	DAU	-	0 Dokumen	50.000.000

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi,Audit dan Pemantauan Terminal	Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	1 Laporan	-	-	-	-	5.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN									
Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perorangan Warga Negara Indoneisa atau Badan Usaha									
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	4 Laporan	34.950.000	PENDAPATAN BAGI HASIL		4 Laporan	50.000.000	

Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota								
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek dalam 1 daerah dalam Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	4 Laporan	34.950.000	PENDAPATAN BAGI HASIL		4 Laporan	50.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang	Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	5 Lokasi	36.067.600	DAU		5 Lokasi	41.000.000

Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau								
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Kabupaten Kapuas Hulu	0 Unit	-	DAU		0 unit	-
Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah dermaga Sungai danau yang di Pembangunan	Kabupaten Kapuas Hulu	1 Unit	100.000.000	DAU		1 Unit	500.000.000

Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Wilyah Kabupaten Kapuas hulu	1 Unit	-	DAU	-	-	-
Pengawasan Pengoprasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoprasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan	Wilyah Kabupaten Kapuas hulu	4 Laporan	15.000.000	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4 Laporan	35.000.000
JUMLAH				7.782.331.000				11.730.424.000

BAB IV

PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran. Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu perlu disusun untuk menetapkan target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025, semoga dapat menjadi bahan petunjuk penyusunan kegiatan dan anggaran untuk tahun 2023. Sekian dan terima kasih.

Putussibau, Desember 2024



ERLI, S.SOS., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19671201 198908 1 004